

Kepatuhan dan ketegasan pegawai negeri pada peraturan daerah bebas rokok: studi komparatif di kabupaten Sleman dan Kulon Progo

Civil servant compliance and assertiveness to non-smoking areas regulation: a comparative study in Sleman and Kulon Progo Regencies

Israini Susanti¹ & Yayi Prabandari¹

Abstract

Dikirim: 14 Juni 2017
Diterbitkan: 1 Desember 2017

Purpose: This study aimed to determine the differences of compliance and civil servants on the application of non-smoking areas in Sleman and Kulon Progo. **Methods:** This analytical survey study used a cross-sectional approach. The subjects of this research were civil servants in the regional work units of Kulon Progo Regency as many as 1,072 and Sleman as many as 2,300 employees at 26 SKPD in Sleman and 25 SKPD in Kulon Progo. The sampling technique used multistage random sampling. The research instruments used were questionnaires, observations, and interviews to support the research. The analysis used was independent t-test and Mann-Whitney tests, namely to determine whether there was a relationship between independent and dependent variables. **Results:** This study found a difference of knowledge on application of perda KTR, attitude and there was difference of socialization to applying of regulation of non-smoking area. Logistic regression tests showed that the dominant factor of the non-smoking area law was the knowledge. **Conclusion:** There was a difference of knowledge, attitude, and socialization among civil servants in Kulon Progo and Sleman. There was no significant difference in attitude, smoking status, compliance, assertiveness, accessibility and social environment among civil servants in Kulon Progo and Sleman districts. The dominant factor affecting the compliance and assertiveness of civil servants is knowledge.

Keywords: civil servant; smoking; non-smoking areas; compliance; assertiveness

¹ Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
(Email : israini123@gmail.com)

PENDAHULUAN

Instansi pemerintahan merupakan tatanan yang ditetapkan dalam kawasan tanpa rokok (KTR), namun kawasan tanpa rokok masih sulit terealisasi dikarenakan pegawai di instansi pemerintah masih banyak yang merokok. Faktor yang memengaruhi pegawai untuk merokok yaitu kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok, pengaruh lingkungan tempat kerja, yaitu adanya teman yang merokok, tidak ada larangan untuk merokok serta faktor psikologis seperti stres dengan pekerjaan, masalah rumah tangga serta masalah di lingkungan tempat tinggal (1). Penyebab pegawai merokok di tempat kerja dikarenakan beban kerja yang tinggi dan jam kerja yang panjang (2). Perilaku merokok pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebabkan permasalahan di tempat kerja, seperti mengganggu konsentrasi bekerja dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pegawai lain yang tidak merokok (1). Upaya pengendalian perlu dilakukan untuk mengurangi perilaku merokok pada instansi pemerintahan dengan menetapkan kawasan larangan merokok yang bertujuan melindungi hak asasi perokok pasif untuk dapat menghirup udara bersih (3).

Pelaksanaan kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat kerja diharapkan memberikan efek positif untuk mengubah perilaku merokok, seperti mengurangi kebiasaan merokok saat jam kerja, merokok di tempat khusus serta upaya untuk berhenti merokok (4). Selain itu, pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat kerja efektif mengurangi paparan perokok pasif terhadap asap rokok serta dapat meningkatkan intensi perokok aktif untuk berhenti merokok (5).

Pegawai Negeri Sipil menjadi panutan masyarakat untuk membiasakan diri tidak merokok di tempat kerja. PNS berkewajiban melaksanakan dan menaati kebijakan pemerintah, termasuk peraturan Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 pasal 115 ayat 2 serta Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 Pasal 49 tentang penerapan kawasan tanpa rokok di tempat kerja. Ketersediaan peraturan kawasan tanpa rokok perlu diimbangi dengan kepatuhan dalam menaati peraturan itu. Berdasarkan permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan dan asertivitas pegawai negeri sipil pada penerapan kawasan tanpa rokok.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*, dimana pengukuran variabel independen dan variabel dependen

dilakukan hanya 1 kali kurun waktu tertentu (6). Penelitian ini bertujuan mengetahui kepatuhan dan asertivitas pegawai negeri sipil pada penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

Populasi penelitian adalah pegawai negeri sipil di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kabupaten Sleman sebanyak 2.300 pegawai pada 26 satuan kerja dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.072 pegawai pada 25 satuan kerja perangkat daerah dengan kriteria inklusi: pegawai negeri sipil non kesehatan di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo yang bersedia menjadi responden dengan menandatangani surat persetujuan. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *multistage random sampling*.

Variabel bebas meliputi peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan non peraturan daerah kawasan tanpa rokok, dengan variabel terikat kepatuhan dan asertivitas pegawai negeri sipil. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari pengetahuan, sikap, status merokok kepatuhan, asertivitas, sosialisasi, aksesibilitas dan lingkungan sosial. Uji statistik *Independent t test* (uji t tidak berpasangan) dilakukan jika data berdistribusi normal dan uji *Mann-Whitney* dilakukan jika data tidak berdistribusi normal.

HASIL

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di satuan kerja perangkat daerah. Responden penelitian terdiri dari 2 Kabupaten yaitu: 162 orang di Kabupaten Kulon Progo dan 174 orang di Kabupaten Sleman. Distribusi karakteristik responden penelitian disajikan pada Tabel 1.

Pengetahuan tentang KTR pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,00 ($p < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan tentang KTR pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman.

Variabel sikap terhadap KTR

Sikap terhadap KTR pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,03 ($p < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan sikap terhadap KTR pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman.

Variabel status merokok

Hasil analisis status merokok pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman diperoleh

nilai *p-value* sebesar 0,16, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan status merokok pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman.

Tabel 1 Karakteristik pegawai negeri sipil di Kulon Progo dan Sleman

| Karakteristik | Kulonprogo | Sleman |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Persentase (%) (n=162) | Persentase (%) (n=174) |
| Umur (tahun) | | |
| ≤ 30 | 5,56 | 6,90 |
| > 30 | 94,44 | 93,10 |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-laki | 69,75 | 59,20 |
| Perempuan | 30,25 | 40,80 |
| Pendidikan | | |
| SMP | 1,85 | 2,30 |
| SMA | 30,24 | 29,89 |
| Diploma/S1 | 58,02 | 52,87 |
| Pascasarjana/S2 | 9,88 | 14,94 |
| Golongan | | |
| II | 20,99 | 22,09 |
| III | 67,28 | 66,67 |
| IV | 11,73 | 10,34 |
| Jabatan | | |
| Staf | 62,69 | 74,71 |
| Kasie/kasubag | 23,46 | 24,14 |
| Kabid | 6,79 | 1,55 |
| Kadis | 2,47 | |
| Fungsional | 4,32 | |
| Lama Kerja (tahun) | | |
| 3- 10 | 34,75 | 30,46 |
| 11-20 | 39,51 | 39,08 |
| 21-30 | 22,04 | 25,29 |
| >30 | 3,09 | 5,17 |
| Pendapatan | | |
| ≤ Rp. 5.000.000,- | 96,91 | 96,55 |
| > Rp. 5.000.000,- | 3,09 | 3,45 |
| Pengetahuan | | |
| Baik | 62,96 | 37,93 |
| Kurang | 37,04 | 62,07 |
| Sikap | | |
| Positif | 48,15 | 59,20 |
| Negatif | 51,85 | 40,80 |
| Status Merokok | | |
| Ringan | 87,50 | 72,97 |
| Sedang | 12,50 | 27,03 |
| Asertivitas | | |
| Tidak Asertif | 59,88 | 41,95 |
| Asertif | 40,12 | 58,05 |
| Kepatuhan | | |
| Tidak Patuh | 50,00 | 45,95 |
| Patuh | 50,00 | 54,05 |
| Aksesibilitas | | |
| Mudah | 52,47 | 61,49 |
| Sulit | 47,53 | 38,51 |
| Sosialisasi | | |
| Ada | 60,49 | 39,66 |
| Tidak ada | 39,51 | 60,34 |
| Lingkungan sosial | | |
| Ada | 92,31 | 90,80 |
| Tidak ada | 6,79 | 9,20 |

Variabel asertivitas

Hasil analisis asertivitas pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,65, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan asertivitas pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman.

Variabel kepatuhan

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata aksesibilitas pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,290 dan di Kabupaten Sleman sebesar 0,385. Nilai *t*-hitung sebesar 1,84 dan nilai *p-value* sebesar 0,06, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan aksesibilitas pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan di Sleman.

Variabel sosialisasi

Hasil analisis sosialisasi pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,00 ($p < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sosialisasi pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan di Sleman.

Variabel Rekan kerja

Hasil analisis lingkungan sosial, terkait ada atau tidaknya rekan kerja yang merokok di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,41, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pada lingkungan sosial, yaitu ada atau tidaknya rekan kerja yang merokok pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan di Sleman.

Model 4 merupakan model terbaik dan dianggap sebagai *final model*. Keseluruhan final model bermakna signifikan secara statistik. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel pengetahuan mempunyai nilai $p = 0,000$ dengan nilai koefisien sebesar 0,938, artinya pengetahuan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan dan asertivitas pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman (Tabel 2).

Tabel 2. Regresi Logistik Final Model

| Model | Variabel Bebas | Coef | P | 95 % CI | |
|---|----------------|--------|--------|---------|-------|
| | | | | Min | Max |
| Model 4 | Pengetahuan | 0,983 | 0,000 | 0,535 | 1,430 |
| | Aksesibilitas | -0,261 | 0,280 | -0,73 | 0,213 |
| <i>Probability > chi²</i> | | | 0,000 | | |
| Pseudo R² | | | 0,0482 | | |

BAHASAN

Pengetahuan terhadap kawasan tanpa rokok (KTR)

Pengetahuan seseorang mengenai kawasan tanpa rokok diperoleh melalui paparan informasi mengenai penerapan kawasan tanpa rokok yang berjalan berkesinambungan (7). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan pengetahuan terhadap kawasan tanpa rokok dipengaruhi pernah atau tidaknya seseorang mendapatkan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok (8). Pengetahuan pengelola tentang penerapan perda kawasan tanpa rokok didapatkan melalui pemberitaan media massa serta sosialisasi dari tim perda kawasan tanpa rokok (8). Penerapan kawasan tanpa rokok secara menyeluruh dapat meningkatkan pengetahuan seseorang tentang kawasan tanpa rokok (9).

Sikap terhadap kawasan tanpa rokok (KTR)

Sikap merupakan kesiapan seseorang untuk setuju ataupun tidak setuju terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Pengetahuan yang baik tentang peraturan kawasan tanpa rokok akan membentuk sikap seseorang untuk mendukung penerapan kawasan tanpa rokok (9). Sikap seseorang yang mendukung dan mematuhi penerapan kawasan tanpa rokok dikarenakan keyakinan bahwa lingkungan bebas asap rokok memiliki dampak positif bagi kesehatan (8). Sikap positif seseorang terhadap penerapan kawasan tanpa rokok tidak selalu berhubungan dengan status merokok dan asertivitas (menegur dan melarang orang untuk merokok) (2).

Status Merokok

Status merokok diartikan sebagai perilaku merokok seseorang yang diklasifikasikan menjadi perokok ringan: 1-10 batang per hari, perokok sedang : 11-20 batang per hari. Seorang perokok akan cenderung memiliki kepatuhan dan intensi yang rendah terhadap penerapan kawasan tanpa rokok karena sudah kecanduan terhadap rokok, sehingga akan sulit untuk mematuhi peraturan (10). Seseorang yang memiliki persepsi positif terhadap rokok cenderung tidak patuh terhadap penerapan peraturan kawasan tanpa rokok (11). Seorang perokok pasif akan lebih tegas untuk menegur orang yang merokok dan mendukung penerapan kawasan tanpa rokok, begitu pula seorang perokok pasif yang memiliki persepsi kerentanan yang positif terhadap rokok akan lebih asertif (11).

Asertivitas

Asertivitas merupakan ketegasan dalam mengemukakan sesuatu yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan tentang peraturan kawasan tanpa rokok kepada orang lain. Asertivitas pegawai dipengaruhi oleh kemampuan dalam berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, lama bekerja dan jabatan, pegawai yang memiliki jabatan lebih tinggi cenderung bersikap asertif. Harga diri tinggi memengaruhi asertivitas seseorang. Semakin positif seseorang merasakan penilaian terhadap dirinya, maka semakin meningkatkan rasa asertif (12).

Seseorang yang merasa bahwa rokok berbahaya cenderung bertindak tegas melindungi hak diri agar terbebas dari asap rokok (9). Faktor lain yang memengaruhi asertivitas adalah budaya birokrasi yang dianut suku Jawa, yaitu *ewuh pakewuh* (sikap segan atau sungkan menyatakan pendapatnya) demi menghindari konflik dan menjaga jalinan hubungan baik terhadap senior (13).

Kepatuhan

Kepatuhan merupakan sikap patuh atau tidak patuh pegawai terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di tempat kerja. Patuh artinya pegawai tidak merokok di tempat kerja, tidak patuh artinya pegawai merokok di tempat kerja. Rendahnya kepatuhan ini dikarenakan perbedaan periode implementasi Perda di masing-masing kabupaten, perbedaan komitmen pemimpin daerah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tidak konsisten (7).

Kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok berhubungan dengan status merokok, seorang perokok cenderung memiliki kepatuhan dan intensi rendah karena sudah kecanduan rokok, sehingga akan sulit untuk mematuhi peraturan (10). Selain itu persepsi seseorang akan memengaruhi kepatuhan seseorang terhadap peraturan, seseorang yang memiliki persepsi positif terhadap rokok cenderung tidak patuh terhadap peraturan kawasan tanpa rokok (11). Sikap mematuhi kawasan tanpa rokok dipengaruhi oleh adanya pengawasan yang intensif dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dapat memengaruhi sikap seseorang dalam mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok (14).

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan dan keterjangkauan seseorang untuk mendapatkan atau membeli rokok. Penelitian menemukan bahwa semua responden mendapatkan rokok dari lingkungan tempat tinggal. Aksesibilitas memperoleh rokok menurun bila disertai penegakan hukum yang kuat. Peningkatan penjualan produk tembakau dan konsumsi rokok di suatu daerah berhubungan erat dengan tidak adanya kebijakan atau peraturan pembatasan penjualan produk tembakau atau rokok (15).

Sosialisasi

Pengaruh teman yang merokok cenderung mengurangi kepatuhan penerapan kawasan tanpa rokok (8). Hubungan pertemanan (lingkungan sosial) dengan status merokok akan semakin kuat, jika dipengaruhi oleh 3 faktor: sosiokultural dan faktor tradisional (merokok saat pertemuan sosial, acara keagamaan dan acara keluarga), *coping practices* (merokok untuk mengurangi stres), dan *medication purposes* (merokok untuk mengusir nyamuk) (14).

Faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan dan asertivitas penerapan KTR

Faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan dan asertivitas penerapan kawasan tanpa rokok adalah pengetahuan. Pengetahuan yang baik terhadap peraturan kawasan tanpa rokok dikarenakan adanya sosialisasi. Institusi yang pernah mendapatkan sosialisasi kawasan tanpa rokok memiliki pengetahuan yang baik terhadap kawasan tanpa rokok (7). Sosialisasi peraturan kawasan tanpa rokok dapat meningkatkan pengetahuan seseorang tentang penerapan kawasan tanpa rokok (8). Pengetahuan bahaya rokok memengaruhi intensi seseorang untuk mematuhi penerapan kawasan tanpa rokok serta dapat meningkatkan intensi untuk berhenti merokok (9).

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan perbedaan pengetahuan, sikap dan sosialisasi pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Faktor paling dominan memengaruhi kepatuhan dan asertivitas pegawai negeri sipil pada penerapan perda kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman adalah pengetahuan.

Abstrak

Tujuan: Mengetahui perbedaan kepatuhan dan PNS terhadap penerapan kawasan bebas rokok di kabupaten Sleman dan Kulon Progo. **Metode:** Penelitian survei analitik ini menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Subyek penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di unit kerja daerah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.072 dan Sleman sebanyak 2.300 karyawan pada 26 SKPD di Sleman dan 25 SKPD di Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel menggunakan *multistage random sampling*. Instrumen penelitian diukur dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara untuk mendukung penelitian. Analisis yang digunakan adalah *independent t-test* dan *Mann-Whitney*: untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel independen dan terikat. **Hasil:** Penelitian ini menemukan perbedaan pengetahuan tentang penerapan perda KTR, sikap dengan dan ada perbedaan sosialisasi dengan penerapan peraturan KTR. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa Faktor dominan yang mempengaruhi penerapan hukum KTR adalah pengetahuan. **Simpulan:** Terdapat perbedaan pengetahuan, sikap, dan sosialisasi kepada pegawai negeri di kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Tidak ada perbedaan dalam sikap, status merokok, kepatuhan, ketegasan, aksesibilitas dan lingkungan sosial kepada pegawai negeri di kabupaten Kulon progo dan Sleman. Faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan dan ketegasan pegawai negeri adalah pengetahuan.

Kata Kunci: pegawai negeri; merokok; area bebas rokok; pemenuhan; ketegasan

PUSTAKA

1. Rizkiani M, Widyastuti RH. Hubungan antara stress dengan perilaku merokok pada pegawai negeri sipil laki-laki. *Jurnal Keperawatan Diponegoro*. 2012;1(1):132-9.
2. Cho YS, Kim HR, Myong JP, Kim HW. Association between work conditions and smoking in South Korea. *Safety and health at work*. 2013 Dec 1;4(4):197-200.
3. Kemenkes RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;2011
4. Zablocki RW, Edland SD, Myers MG, Strong DR, Hofstetter CR, Al-Delaimy WK. Smoking ban policies and their influence on smoking behaviors among current California smokers: a population-based study. *Preventive medicine*. 2014 Feb 1;59:73-8.

5. Lee JT, Glantz SA, Millett C. Effect of smoke-free legislation on adult smoking behaviour in England in the 18 months following implementation. *PloS one*. 2011 Jun 15;6(6):e20933.
6. Riyanto A. Aplikasi metodologi penelitian kesehatan;2011.
7. Astuti PA, Ked S, ASTUTI PA. Progress on Compliance to Smoke Free Law in Bali-What Makes the Difference.
8. Devhy NL. Pengaruh Faktor Pengelola terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa Rokok pada Hotel Berbintang di Kabupaten Badung.
9. Shelley D, Fahs MC, Yerneni R, Qu J, Burton D. Correlates of household smoking bans among Chinese Americans. *Nicotine & tobacco research*. 2006 Feb 1;8(1):103-12.
10. Parks T, Wilson CV, Turner K, Chin JW. Failure of hospital employees to comply with smoke-free policy is associated with nicotine dependence and motives for smoking: a descriptive cross-sectional study at a teaching hospital in the United Kingdom. *BMC Public Health*. 2009 Dec;9(1):238.
11. Hidayati T, Arikensiw E. Persepsi dan Perilaku Merokok Siswa, Guru dan Karyawan Madrasah. *Mutiara Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. 2016 Feb 1;12(1):31-40.
12. Aspropoulos E, Lazuras L, Rodafinos A, Eiser JR. Can you please put it out? Predicting non-smokers' assertiveness intentions at work. *Tobacco control*. 2010 Apr 1;19(2):148-52.
13. Harry Indradjit Soeharjono. Pengaruh Budaya Birokrasi Ewuh-Pakewuh Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada;2013.
14. Aherrera A, Çarkoğlu A, Hayran M, Ergör G, Ergüder T, Kaplan B, Susan J, Zheng L, Cohen JE, Navas-Acien A. Factors that influence attitude and enforcement of the smoke-free law in Turkey: a survey of hospitality venue owners and employees. *Tobacco control*. 2016 Sep 30;tobaccocontrol-2016.
15. Barnoya J, Monzon JC, Briz P, Navas-Acien A. Compliance to the smoke-free law in Guatemala 5-years after implementation. *BMC public health*. 2016 Dec;16(1):318.
16. Azkha N. Studi efektivitas penerapan kebijakan perda kota tentang kawasan tanpa rokok (ktr) dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat tahun 2013.